

PERAN INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KRISIS DI MYANMAR 2021-2022

Hanura Krista K.¹

1. Program Studi Magister Hubungan Internasional Universitas Jenderal Achmad Yani, Cimahi, Indonesia

ABSTRACT

As a country that is experiencing conflict, it is Indonesia's obligation as a member of ASEAN to try to help resolve the conflict. Indonesia took an active role in efforts to overcome the crisis and violence that occurred in Myanmar after the military coup. Indonesia's role is highly anticipated by other countries in the region. In its implementation, Indonesia used various approaches to contribute to the resolution of the Myanmar military coup in 2021. This research uses a qualitative method, which aims to explore and understand the meaning given by individuals or groups to certain social and humanitarian problems.

Keywords: Role, Military Coup, Military

ABSTRAK

Sebagai negara yang tengah mengalami konflik, sudah menjadi kewajiban Indonesia sebagai anggota ASEAN untuk berupaya membantu penyelesaian konflik tersebut. Indonesia mengambil peran aktif dalam upaya mengatasi krisis dan kekerasan yang terjadi di Myanmar pasca kudeta militer. Peran Indonesia sangat dinantikan oleh negara-negara lain di kawasan. Dalam pelaksanaannya, Indonesia menggunakan berbagai pendekatan untuk berkontribusi dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar pada tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang diberikan oleh individu atau kelompok terhadap masalah sosial dan kemanusiaan tertentu.

Kata Kunci: Peran, Kudeta Militer, Militer

PENDAHULUAN

Hubungan internasional memegang peran penting dalam mengatasi berbagai persoalan yang dihadapi negara-negara berdaulat. Ketika sebuah negara mengalami tantangan besar baik dari segi keamanan, politik, ekonomi, maupun sosial, hubungan internasional menjadi salah satu mekanisme utama untuk membangun solusi kolektif. Bagi Indonesia, keterlibatan aktif dalam forum internasional tidak hanya bermanfaat secara strategis, tetapi juga memperkuat citra dan pengaruhnya di tingkat global. Komitmen tersebut tercermin dalam prinsip politik luar negeri bebas-aktif, yang menekankan ketidakberpihakan pada blok kekuatan tertentu sekaligus mendorong peran aktif dalam menciptakan perdamaian dunia.

Salah satu arena yang memperlihatkan konsistensi Indonesia dalam menjalankan peran ini adalah ASEAN. Didirikan pada 1967 melalui Deklarasi Bangkok, ASEAN bertujuan mewujudkan perdamaian, kemajuan, dan kemakmuran di Asia Tenggara (Sitoresmi, 2024). Karakteristik khas organisasi ini, yang dikenal sebagai *The ASEAN Way*, menekankan prinsip non-intervensi, pengambilan keputusan melalui konsensus, dan penyelesaian sengketa secara damai (Wirengjurit, 2023). Prinsip-prinsip tersebut telah membantu menjaga stabilitas kawasan di tengah dinamika geopolitik yang kompleks. Indonesia, sebagai salah satu pendiri dan

anggota terbesar ASEAN, memainkan peran sentral dalam menjaga kohesi organisasi, menginisiasi dialog, dan menjadi mediator dalam berbagai konflik regional.

Pengalaman diplomasi Indonesia dalam memediasi penyelesaian konflik Kamboja pada akhir 1980-an menjadi preseden penting yang menunjukkan kemampuan Jakarta untuk memadukan pendekatan bilateral dan multilateral. Melalui keanggotaan aktif di ASEAN, Indonesia juga telah berperan dalam isu-isu strategis seperti Laut Cina Selatan, pembentukan ASEAN *Free Trade Area* (AFTA), dan dukungan terhadap pembentukan zona bebas senjata nuklir di kawasan. Namun, soliditas ASEAN kerap diuji oleh krisis internal negara anggotanya. Salah satu ujian terbesar dalam dekade terakhir adalah krisis politik di Myanmar. Negara ini memiliki sejarah panjang pemerintahan militer, pelanggaran hak asasi manusia, dan konflik etnis. Penindasan terhadap etnis Rohingya sejak 2012, yang memuncak pada tragedi 2017, telah menimbulkan krisis kemanusiaan berskala besar, dengan jutaan pengungsi melarikan diri ke Bangladesh (Perawongmetha, 2024). Situasi ini memperburuk citra internasional Myanmar dan memunculkan pertanyaan serius mengenai komitmen pemerintahnya terhadap demokrasi dan HAM.

Krisis semakin memburuk pada 1 Februari 2021 ketika Tatmadaw (militer Myanmar) melancarkan kudeta, menggulingkan pemerintahan sipil yang dipimpin Aung San Suu Kyi. Kudeta ini terjadi tidak lama setelah Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) memenangkan mayoritas kursi parlemen dalam pemilu November 2020 (Rozak, 2024). Militer menolak hasil tersebut dengan tuduhan kecurangan, meski Komisi Pemilihan menegaskan tidak ada bukti signifikan. Penahanan terhadap Aung San Suu Kyi, Presiden Win Myint, dan tokoh NLD lainnya memicu gelombang protes besar-besaran di berbagai kota. Aparat keamanan menanggapi dengan kekerasan, menggunakan peluru tajam, gas air mata, dan penangkapan massal, yang mengakibatkan ratusan korban jiwa.

Kudeta ini tidak hanya mengguncang stabilitas domestik Myanmar, tetapi juga memicu reaksi keras dari komunitas internasional. Sejumlah negara Barat memberlakukan sanksi ekonomi terhadap pejabat militer, sementara Tiongkok dan Rusia memilih mempertahankan hubungan strategis mereka dengan junta. Bagi ASEAN, krisis ini menjadi dilema: di satu sisi, prinsip non-intervensi membatasi ruang gerak; di sisi lain, instabilitas Myanmar berpotensi mengganggu keamanan, perdagangan, dan kerja sama kawasan.

Indonesia memandang penyelesaian krisis Myanmar sebagai tanggung jawab moral dan strategis. Kedekatan historis kedua negara, kerja sama bilateral di berbagai sektor, serta pengalaman diplomasi Indonesia di forum ASEAN menjadi modal penting. Sejak awal krisis, Indonesia aktif melakukan *shuttle diplomacy* untuk membuka komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk militer Myanmar, kelompok pro-demokrasi, dan mitra internasional. Jakarta juga mendorong terbentuknya Konsensus Lima Poin ASEAN pada KTT darurat April 2021, yang mencakup penghentian kekerasan, dialog konstruktif, penunjukan utusan khusus ASEAN, penerimaan bantuan kemanusiaan, dan kunjungan utusan ke Myanmar.

Meski demikian, implementasi konsensus tersebut menghadapi hambatan besar. Junta militer menunjukkan resistensi terhadap komitmen yang telah disepakati, termasuk menolak akses penuh utusan ASEAN ke semua pihak terkait. Perbedaan posisi di antara negara anggota ASEAN juga memperlambat respons kolektif. Beberapa anggota memilih pendekatan lebih hati-hati, sementara yang lain mendorong sanksi dan tekanan diplomatik yang lebih keras.

Konteks ini semakin kompleks jika melihat dimensi geopolitik. Myanmar memiliki posisi strategis di antara dua kekuatan besar Asia, Tiongkok dan India, yang masing-masing memiliki kepentingan ekonomi dan politik di negara tersebut. Tiongkok, misalnya, memandang Myanmar sebagai mitra penting dalam inisiatif Belt and Road, sementara India melihatnya sebagai bagian dari strategi Act East Policy. Kedua negara cenderung menghindari

langkah-langkah yang dapat melemahkan hubungan mereka dengan junta. Selain aspek politik dan keamanan, krisis Myanmar juga memiliki dimensi kemanusiaan yang mendesak. Represi militer dan kekerasan terhadap demonstran telah memicu gelombang pengungsian baru, memperburuk kondisi kemanusiaan yang sebelumnya sudah rapuh akibat pandemi COVID-19 dan krisis Rohingya. Organisasi internasional, termasuk PBB, menghadapi kesulitan menyalurkan bantuan karena pembatasan akses dari pihak militer. Dalam situasi seperti ini, ASEAN dengan Indonesia sebagai motor penggerak memiliki peluang untuk memainkan peran yang lebih besar, meskipun dihadapkan pada keterbatasan normatif dan kelembagaan.

Pengalaman Indonesia dalam menangani isu Rakhine sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan yang menggabungkan diplomasi politik dan kemanusiaan dapat membuka ruang dialog. Melalui KBRI Yangon dan kerja sama dengan AHA Centre, Indonesia berhasil menyalurkan bantuan kemanusiaan dan mendorong pembahasan isu Rakhine dalam agenda ASEAN (Ali Fikri & Mayola, 2024). Model pendekatan ini menjadi relevan untuk diterapkan kembali, dengan adaptasi terhadap konteks krisis pasca kudeta.

Dalam kerangka penelitian ini, penting untuk menelaah secara mendalam langkah-langkah diplomatik Indonesia, baik di tingkat bilateral maupun multilateral. Analisis mencakup strategi negosiasi, upaya membangun konsensus di ASEAN, dan koordinasi dengan aktor eksternal seperti PBB dan negara mitra. Selain itu, evaluasi terhadap efektivitas strategi tersebut perlu mempertimbangkan hambatan yang bersumber dari faktor internal Myanmar, perbedaan kepentingan di ASEAN, dan pengaruh geopolitik eksternal.

Berdasarkan dinamika tersebut, krisis Myanmar pasca kudeta 2021 tidak hanya menjadi tantangan bagi ketahanan politik domestik negara itu, tetapi juga bagi kredibilitas ASEAN sebagai organisasi regional. Peran Indonesia sebagai aktor sentral di ASEAN menjadi kunci untuk memastikan terciptanya solusi yang berkelanjutan dan inklusif. Artikel ini berupaya menguraikan secara kritis bagaimana Indonesia memanfaatkan instrumen diplomasi untuk menjembatani perbedaan, mengelola dinamika geopolitik, dan mendorong implementasi kesepakatan regional. Dengan fokus pada periode 2021-2022, penelitian ini menawarkan perspektif baru tentang interaksi antara kepentingan nasional, norma organisasi regional, dan realitas politik dalam penyelesaian krisis di Myanmar.

KERANGKA ANALITIK

Kerangka analitik yang akan digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan analisis peran (*role analysis*) dalam konteks organisasi internasional, yang mana hal ini berkaitan dengan posisi Indonesia sebagai negara anggota ASEAN yang memiliki tanggung jawab dalam menjaga stabilitas kawasan Asia Tenggara dengan memperhatikan beberapa aspek fundamental seperti konsepsi peran nasional (*national role conception*) dan implementasinya. Dalam analisis peran juga dijelaskan bahwa setiap negara dalam organisasi internasional memiliki seperangkat tindakan yang diharapkan sesuai dengan status dan kedudukannya dalam sistem regional tersebut, dimana terdapat perbedaan antara peran yang diharapkan (*expected role*) dan peran yang dilakukan (*performed role*). Konsep peran dalam hubungan internasional menunjukkan bahwa negara bertindak berdasarkan pemahaman mereka tentang posisi dan fungsi yang seharusnya dimainkan dalam komunitas internasional.

Kondisi Myanmar yang mengalami kudeta militer ini juga membuat Indonesia harus menjalankan fungsi self-help dalam konteks regional dimana Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN harus mampu merespons krisis dengan memanfaatkan sumber daya dan kekuatan diplomatiknya untuk mempertahankan kepentingan kawasan, dimana seperti yang dikatakan oleh Koentjaraningrat bahwa "peran berarti tingkah laku seseorang yang memutuskan suatu kedudukan tertentu" (Koentjaraningrat, 1974). Indonesia dalam hal ini

harus menentukan respons yang tepat berdasarkan persepsi ancaman terhadap stabilitas kawasan, dimana jika situasi Myanmar dianggap dapat mengganggu harmoni ASEAN maka Indonesia akan bereaksi sesuai dengan peran yang diembannya sebagai negara besar di kawasan. Soerjono Soekanto juga menjelaskan bahwa seseorang atau negara menjalankan peranannya ketika melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, karena peran adalah aspek dinamis dari status yang dimiliki.

Maka berdasarkan penjabaran tersebut, Indonesia melihat bahwa kondisi kudeta militer Myanmar berada pada kompleksitas yang cukup serius bagi stabilitas ASEAN, dimana dalam keadaan ini Indonesia melihat bahwa situasi keamanan dan demokratisasi di kawasan tersebut sedang terancam sehingga diperlukan suatu respons diplomatik yang sesuai dengan perannya. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, dimana konsep peran menunjukkan bahwa negara akan merespons sebuah krisis berdasarkan ekspektasi dan fungsi yang melekat pada statusnya dalam organisasi internasional. Pada keadaan ini seperti halnya Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya yang harus menentukan sikap kolektif terhadap kondisi Myanmar yang semakin mengkhawatirkan.

Serta penggunaan konsep-konsep turunan lainnya, yakni konsep organisasi internasional yang menjelaskan bagaimana ASEAN sebagai organisasi regional berfungsi dalam menangani krisis politik anggotanya, kemudian konsep kudeta militer untuk memahami dinamika dan tipologi pengambilalihan kekuasaan yang terjadi di Myanmar, hingga prinsip-prinsip diplomasi multilateral dan mekanisme konsensus ASEAN untuk memberikan penjelasan secara komprehensif mengenai fenomena permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe deskriptif-analitis untuk memahami secara mendalam peran Indonesia dalam merespons kudeta militer Myanmar dalam konteks ASEAN. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi (pengumpulan data sekunder dari literatur ilmiah), observasi (pengamatan dan pencatatan langsung terhadap gejala objek yang diteliti), dan wawancara (tanya jawab dengan informan menggunakan pertanyaan yang telah disiapkan). Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus yang bertujuan menggali makna dan interpretasi mendalam terhadap dinamika respons Indonesia sebagai salah satu pendiri ASEAN dalam menghadapi krisis politik di Myanmar.

Sumber data terdiri dari literatur ilmiah seperti buku, makalah, jurnal, majalah, surat kabar, serta dokumen resmi yang diterbitkan maupun tidak dari sumber lain yang relevan dengan kajian penelitian. Untuk menjaga validitas, digunakan triangulasi dengan mempertimbangkan aspek sumber, teknik dan waktu, serta menggunakan bahan referensi untuk cross check data.

Analisis data menggunakan pendekatan kualitatif yang terdiri dari tiga tahap: reduksi data (memilih dan memilah data pokok yang sesuai dengan fokus penelitian), penyajian data (menyusun temuan dalam bentuk kata-kata, kalimat, dan skema), dan verifikasi data (menguji validitas dan reliabilitas data secara empiris). Proses ini dilakukan secara berulang untuk memastikan hasil analisis bersifat mendalam dan akurat dalam menjelaskan kompleksitas peran Indonesia dalam krisis Myanmar.

PEMBAHASAN

Krisis politik di Myanmar pasca kudeta militer 1 Februari 2021 telah menjadi isu regional yang menyita perhatian dunia internasional, khususnya ASEAN. Sebagai salah satu negara pendiri ASEAN, Indonesia memainkan peran aktif dalam upaya penyelesaian konflik

tersebut melalui berbagai mekanisme diplomasi, baik bilateral maupun multilateral. Pembahasan ini akan menguraikan secara sistematis langkah-langkah yang ditempuh Indonesia, hambatan yang dihadapi, dan konteks politik yang memengaruhi dinamika penyelesaian krisis Myanmar, dengan berlandaskan pada kerangka analisis hubungan internasional dan dokumen resmi yang relevan. Kudeta yang dilakukan Tatmadaw menggulingkan pemerintahan sipil yang sah, menahan Aung San Suu Kyi, dan membubarkan hasil Pemilu 2020 yang dimenangkan oleh NLD. Langkah ini memicu gelombang protes di seluruh negeri, yang ditanggapi dengan kekerasan oleh militer, menimbulkan korban jiwa dalam jumlah signifikan. Reaksi internasional pun muncul, mulai dari kecaman, sanksi ekonomi, hingga pembatasan hubungan diplomatik. Namun, bagi ASEAN, krisis ini menimbulkan dilema antara mempertahankan prinsip non-intervensi dengan kebutuhan untuk menjaga stabilitas kawasan.

Indonesia melihat situasi ini sebagai ancaman bagi perdamaian dan keamanan regional. Sejak awal, Indonesia menempuh jalur diplomasi intensif, mengedepankan prinsip *constructive engagement* untuk mendorong dialog antara pihak-pihak yang bertikai. Salah satu langkah awal yang dilakukan adalah komunikasi bilateral dengan pemerintah Myanmar, yang diwakili oleh militer, guna menyampaikan keprihatinan atas tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Diplomasi ini juga diarahkan untuk membangun kepercayaan dan membuka ruang bagi penyelesaian damai. Selain jalur bilateral, Indonesia aktif memanfaatkan forum ASEAN untuk membahas krisis Myanmar. Puncaknya adalah inisiatif Indonesia dalam penyelenggaraan KTT ASEAN pada April 2021 yang menghasilkan Konsensus Lima Poin. Konsensus ini berisi: (1) penghentian segera kekerasan; (2) dimulainya dialog konstruktif di antara semua pihak; (3) penunjukan utusan khusus ASEAN untuk memediasi; (4) pemberian bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre; dan (5) kunjungan utusan khusus ke Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait (Wardah, 2023).

Peran Indonesia dalam perumusan konsensus tersebut tidak terlepas dari kepemimpinan diplomasi yang terukur dan kemampuan membangun kesepahaman di antara negara anggota ASEAN yang memiliki pandangan berbeda. Beberapa anggota cenderung berhati-hati, menghindari konfrontasi langsung dengan junta militer Myanmar, sementara yang lain mendorong respons yang lebih keras. Indonesia berada di posisi tengah, mencoba menjembatani perbedaan tersebut sambil memastikan bahwa prinsip-prinsip dasar ASEAN tetap terjaga.

Implementasi Konsensus Lima Poin menjadi tantangan besar. Junta militer Myanmar menunjukkan resistensi terhadap beberapa poin, terutama yang berkaitan dengan akses utusan khusus dan penghentian kekerasan. Dalam kondisi ini, Indonesia tetap konsisten mendorong implementasi penuh konsensus melalui pendekatan diplomasi berlapis. Di tingkat regional, Indonesia memanfaatkan perannya di ASEAN untuk memastikan isu Myanmar tetap menjadi agenda utama. Di tingkat internasional, Indonesia berkoordinasi dengan PBB, Amerika Serikat, Uni Eropa, serta negara mitra seperti Australia dan Jepang untuk menggalang dukungan yang lebih luas.

Pendekatan yang ditempuh Indonesia dapat dikategorikan sebagai *multi-track diplomacy* (Mujiono et al., 2019). Track pertama adalah diplomasi pemerintah ke pemerintah (government to government), yang melibatkan komunikasi langsung antara pejabat tinggi dan menteri luar negeri. Track kedua mencakup diplomasi melalui organisasi internasional dan forum multilateral, termasuk ASEAN, PBB, dan G20. Track ketiga adalah diplomasi kemanusiaan, yang melibatkan pemberian bantuan langsung kepada masyarakat Myanmar melalui mekanisme AHA Centre.

Diplomasi kemanusiaan ini penting untuk meredakan ketegangan dan memberikan sinyal bahwa keterlibatan ASEAN termasuk Indonesia tidak hanya bersifat politis, tetapi juga peduli pada kondisi rakyat Myanmar. Indonesia berupaya memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disalurkan secara efektif meski ada hambatan dari pihak militer. Koordinasi dengan AHA Centre menjadi kunci dalam memastikan distribusi bantuan yang tepat sasaran. Namun, upaya Indonesia tidak selalu berjalan mulus. Tantangan datang dari beberapa faktor, antara lain: (1) resistensi junta militer yang mempersulit akses komunikasi dengan kelompok oposisi; (2) perbedaan posisi di antara negara anggota ASEAN terkait intensitas intervensi; (3) keterbatasan mekanisme sanksi atau tekanan yang dapat diberikan ASEAN; dan (4) pengaruh eksternal dari negara-negara besar yang memiliki kepentingan strategis di Myanmar.

Pengaruh eksternal ini cukup signifikan. Tiongkok, misalnya, memiliki kepentingan ekonomi besar di Myanmar, termasuk proyek infrastruktur dalam kerangka *Belt and Road Initiative*. Sementara Rusia melihat Myanmar sebagai pasar potensial untuk ekspor senjata. Kepentingan-kepentingan ini sering kali membuat tekanan internasional terhadap junta menjadi terfragmentasi dan kurang efektif. Indonesia harus menavigasi dinamika ini dengan hati-hati, menjaga hubungan baik dengan semua pihak sambil tetap konsisten pada prinsip penyelesaian damai.

Pada saat yang sama, Indonesia menghadapi ekspektasi tinggi dari komunitas internasional. Sebagai negara demokrasi terbesar di Asia Tenggara dan pemimpin de facto di ASEAN, Indonesia diharapkan dapat memimpin upaya penyelesaian krisis secara efektif. Ekspektasi ini menjadi beban sekaligus peluang bagi Indonesia untuk memperkuat perannya di kawasan. Di tingkat domestik, kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Myanmar juga dipengaruhi oleh pandangan publik dan media. Kekerasan yang terjadi di Myanmar mendapat liputan luas di Indonesia, memunculkan tuntutan dari masyarakat sipil agar pemerintah mengambil langkah lebih tegas. LSM dan organisasi HAM mendorong agar Indonesia tidak hanya fokus pada dialog, tetapi juga mempertimbangkan langkah-langkah yang dapat memberikan tekanan nyata kepada junta.

Meskipun tekanan tersebut besar, Indonesia tetap berpegang pada pendekatan yang mengutamakan diplomasi damai dan inklusif. Pemerintah berpendapat bahwa konfrontasi terbuka atau sanksi sepihak dapat memperburuk situasi dan mengurangi ruang dialog. Pendekatan ini sejalan dengan tradisi politik luar negeri Indonesia yang mengedepankan *quiet diplomacy* untuk membangun kepercayaan dan menghindari eskalasi.

Seiring berjalannya waktu, Indonesia terus memantau perkembangan di Myanmar, menyesuaikan strategi diplomasi sesuai kondisi di lapangan. Misalnya, ketika laporan kekerasan meningkat, Indonesia meningkatkan intensitas komunikasi dengan negara anggota ASEAN lainnya untuk mencari langkah kolektif. Di sisi lain, Indonesia juga berusaha menjaga jalur komunikasi dengan junta agar pintu dialog tidak tertutup sepenuhnya.

Langkah-langkah diplomasi Indonesia terhadap krisis Myanmar juga tercermin dalam berbagai pertemuan resmi ASEAN sepanjang 2021-2022. Pada pertemuan tingkat menteri luar negeri ASEAN, Indonesia secara konsisten mengangkat isu implementasi Konsensus Lima Poin sebagai agenda prioritas. Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, menekankan bahwa kredibilitas ASEAN dipertaruhkan jika tidak ada kemajuan nyata dalam menyelesaikan krisis ini.

Salah satu strategi yang digunakan adalah mendorong pembentukan mekanisme pemantauan implementasi konsensus. Indonesia menilai bahwa tanpa sistem pemantauan yang jelas, sulit memastikan komitmen semua pihak, terutama junta militer Myanmar. Meskipun ide ini mendapat dukungan dari sebagian anggota, beberapa negara ASEAN masih ragu karena

khawatir dianggap melanggar prinsip non-intervensi. Perdebatan ini mencerminkan dilema internal ASEAN dalam menangani konflik domestik anggotanya.

Selain itu, Indonesia juga berusaha memastikan bahwa utusan khusus ASEAN memiliki kewenangan yang cukup untuk melakukan mediasi. Penunjukan utusan khusus dari Kamboja pada 2022, misalnya, memunculkan tantangan tersendiri karena adanya perbedaan pendekatan antara Kamboja dan Indonesia dalam mengelola krisis Myanmar. Indonesia tetap mendorong agar utusan khusus dapat mengakses semua pihak terkait, termasuk kelompok oposisi seperti *National Unity Government* (NUG) dan perwakilan etnis minoritas.

Diplomasi yang dilakukan Indonesia tidak terbatas pada kerangka ASEAN semata. Indonesia juga membangun komunikasi intensif dengan PBB, khususnya melalui Sekretaris Jenderal dan Utusan Khusus PBB untuk Myanmar. Kerja sama ini bertujuan memperkuat sinergi antara ASEAN dan PBB, menghindari duplikasi upaya, serta memastikan bahwa bantuan kemanusiaan dapat disalurkan dengan efektif. Indonesia menyadari bahwa dukungan PBB dapat memperkuat posisi ASEAN dalam menekan junta untuk mematuhi kesepakatan.

Hubungan Indonesia dengan negara-negara mitra seperti Amerika Serikat, Australia, dan Uni Eropa juga dimanfaatkan untuk menggalang dukungan terhadap resolusi damai. Negara-negara ini memiliki instrumen tekanan, seperti sanksi ekonomi, yang tidak dimiliki ASEAN. Indonesia memposisikan diri sebagai jembatan antara pendekatan keras negara-negara Barat dan pendekatan dialog yang dianut ASEAN, dengan harapan kombinasi keduanya dapat menghasilkan hasil yang lebih efektif.

Namun, di lapangan, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan. Junta militer kerap mengulur waktu atau memberikan janji yang tidak diikuti tindakan konkret. Misalnya, meski menyatakan akan menerima utusan khusus ASEAN, akses yang diberikan terbatas dan tidak menyentuh pihak oposisi. Selain itu, kekerasan terhadap warga sipil terus terjadi, menimbulkan pertanyaan serius tentang komitmen junta terhadap resolusi damai.

Dalam konteks ini, Indonesia mengadopsi pendekatan fleksibel yang memadukan diplomasi resmi dengan diplomasi kemanusiaan. Misalnya, bantuan kemanusiaan yang disalurkan melalui *AHA Centre* tidak hanya berupa barang kebutuhan pokok, tetapi juga dukungan logistik untuk mempercepat distribusi. Indonesia berupaya memastikan bahwa bantuan tidak dimanipulasi untuk kepentingan politik oleh junta, meskipun pengawasan di lapangan tetap menjadi tantangan.

Penting dicatat bahwa peran Indonesia juga mendapat pengakuan dari berbagai pihak internasional. Beberapa analis hubungan internasional menilai bahwa keterlibatan aktif Indonesia membantu menjaga relevansi ASEAN di mata dunia, mengingat kritik yang menyebut ASEAN lamban merespons krisis Myanmar (Gunawan, 2024). Pandangan ini didukung oleh fakta bahwa Indonesia berhasil menjaga isu Myanmar tetap menjadi topik utama di berbagai forum regional dan internasional.

Selain jalur resmi, Indonesia juga memanfaatkan diplomasi publik untuk membangun dukungan. Pernyataan resmi, wawancara media, dan publikasi mengenai komitmen Indonesia dalam isu Myanmar menjadi bagian dari strategi ini. Diplomasi publik bertujuan menciptakan tekanan moral terhadap junta dan menunjukkan kepada masyarakat Myanmar bahwa ASEAN, khususnya Indonesia, peduli terhadap nasib mereka.

Indonesia menyadari bahwa krisis Myanmar adalah masalah jangka panjang yang memerlukan kesabaran strategis. Karena itu, langkah-langkah yang diambil tidak hanya fokus pada penghentian kekerasan jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi untuk dialog politik yang inklusif. Salah satu gagasan yang didorong adalah perlunya proses rekonsiliasi nasional yang melibatkan semua pihak, termasuk militer, partai politik sipil, kelompok etnis bersenjata, dan masyarakat sipil.

Namun, gagasan ini tidak mudah diterima oleh semua pihak. Sebagian kelompok pro-demokrasi menolak dialog dengan militer selama kekerasan masih berlangsung. Di sisi lain, militer enggan memberikan konsesi politik sebelum posisinya benar-benar terancam. Kondisi ini menciptakan kebuntuan yang mempersulit kemajuan negosiasi.

Indonesia mencoba memecah kebuntuan dengan mengedepankan **confidence building measures**. Langkah-langkah ini mencakup fasilitasi pertemuan informal, pemberian bantuan kemanusiaan yang bersifat netral, dan dukungan terhadap inisiatif masyarakat sipil yang mempromosikan perdamaian. Dengan pendekatan ini, diharapkan tercipta ruang dialog yang lebih konstruktif di masa depan.

Faktor lain yang memengaruhi diplomasi Indonesia adalah dinamika politik domestik di Myanmar sendiri. Sejak kudeta, junta menghadapi perlawanan bersenjata yang semakin terorganisasi, terutama di wilayah perbatasan. Kelompok-kelompok etnis bersenjata yang sebelumnya memiliki perjanjian damai dengan pemerintah mulai memutuskan kerja sama dan melancarkan serangan. Perkembangan ini meningkatkan risiko konflik berkepanjangan yang dapat berdampak pada keamanan kawasan. Dari perspektif ASEAN, konflik bersenjata internal Myanmar berpotensi memicu arus pengungsi ke negara-negara tetangga, termasuk Thailand, Bangladesh, dan India. Indonesia menilai bahwa penanganan krisis ini tidak hanya soal politik, tetapi juga soal keamanan regional dan kemanusiaan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan semua aspek tersebut secara menyeluruh.

Peran Indonesia dalam isu ini semakin relevan ketika menjabat sebagai Ketua ASEAN pada 2023. Posisi ini memberi peluang untuk mengarahkan agenda organisasi dan memperkuat upaya implementasi Konsensus Lima Poin. Indonesia memanfaatkan momentum ini untuk mengadakan lebih banyak pertemuan tingkat tinggi yang secara khusus membahas Myanmar, serta mendorong keterlibatan aktor eksternal yang konstruktif. Meski begitu, tantangan tetap besar. Perbedaan kepentingan di antara negara anggota ASEAN, sikap keras kepala junta, dan kompleksitas geopolitik menjadikan krisis Myanmar sebagai salah satu masalah paling sulit dihadapi ASEAN sejak berdirinya. Dalam situasi ini, kemampuan Indonesia untuk memadukan prinsip-prinsip diplomasi dengan realitas politik akan sangat menentukan keberhasilan upaya penyelesaian.

Kepemimpinan Indonesia dalam menangani krisis Myanmar selama masa keketuaannya di ASEAN pada 2023 tercermin dari sejumlah inisiatif konkret. Salah satunya adalah pendekatan yang disebut sebagai *quiet diplomacy* yang dilakukan secara intensif di belakang layar (Dianti & Firdaus, 2023). Pendekatan ini memungkinkan Indonesia membangun komunikasi yang lebih terbuka dengan semua pihak, tanpa menimbulkan tekanan publik yang berlebihan yang dapat memicu resistensi.

Sebagai Ketua ASEAN, Indonesia menginisiasi serangkaian pertemuan informal yang melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk perwakilan junta militer, kelompok oposisi, dan komunitas internasional. Tujuannya adalah untuk menemukan titik temu yang memungkinkan dimulainya proses dialog resmi. Meskipun sebagian besar hasil dari pertemuan ini tidak dipublikasikan, langkah tersebut dinilai penting dalam menciptakan confidence-building yang diperlukan untuk proses mediasi jangka panjang.

Selain itu, Indonesia juga memperkuat koordinasi dengan AHA Centre untuk memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan berjalan lancar. Fokus bantuan tidak hanya pada kebutuhan dasar seperti makanan dan obat-obatan, tetapi juga pada dukungan bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak-anak. Dengan menggandeng mitra internasional, termasuk organisasi non-pemerintah, Indonesia berupaya memperluas jangkauan bantuan sehingga dapat menjangkau wilayah yang sulit diakses akibat konflik.

Indonesia memanfaatkan peran ketuanya untuk mendorong ASEAN agar lebih proaktif dalam memantau perkembangan di Myanmar. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pembentukan mekanisme laporan berkala mengenai implementasi Konsensus Lima Poin. Laporan ini menjadi bahan evaluasi dalam setiap pertemuan tingkat menteri, sehingga memberikan tekanan moral kepada junta untuk menunjukkan kemajuan.

Namun, tantangan signifikan tetap muncul dari perbedaan pendekatan di antara negara anggota ASEAN. Beberapa negara lebih memilih strategi *constructive engagement* yang lunak, sementara lainnya menginginkan langkah-langkah lebih tegas seperti pembekuan keanggotaan Myanmar di beberapa kegiatan ASEAN. Indonesia berusaha menyeimbangkan dua pandangan ini, mengingat kesatuan ASEAN adalah modal penting untuk menjaga kredibilitasnya di mata dunia.

Selain peran di lingkup ASEAN, Indonesia juga aktif dalam forum internasional lain untuk membahas isu Myanmar. Misalnya, Indonesia menggunakan posisinya di G20 dan kerjasama dengan PBB untuk mengangkat isu ini ke tingkat global. Dalam berbagai kesempatan, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan bahwa penyelesaian krisis Myanmar memerlukan kerja sama internasional yang luas, mengingat dampaknya yang melintasi batas negara.

Dalam menjalankan diplomasi ini, Indonesia tetap berpegang pada prinsip bahwa penyelesaian harus bersifat inklusif. Artinya, semua pihak yang terlibat dalam konflik baik militer, kelompok politik sipil, maupun kelompok etnis bersenjata harus dilibatkan dalam proses dialog. Pendekatan ini menuntut fleksibilitas tinggi dalam bernegosiasi, mengingat setiap pihak memiliki tuntutan dan kepentingan yang berbeda.

Sementara itu, di Myanmar sendiri, situasi terus memburuk dengan meningkatnya perlawanan bersenjata dari kelompok etnis. Wilayah perbatasan menjadi titik konflik intensif yang menyulitkan distribusi bantuan kemanusiaan. Kondisi ini membuat peran ASEAN, khususnya Indonesia, semakin penting dalam mendorong gencatan senjata sementara untuk memungkinkan penyaluran bantuan.

Indonesia memandang bahwa upaya kemanusiaan dapat menjadi pintu masuk untuk memulai proses politik. Dengan menunjukkan bahwa ASEAN dapat memberikan manfaat nyata bagi rakyat Myanmar, diharapkan tercipta kepercayaan yang dapat membuka jalan bagi negosiasi lebih lanjut. Oleh karena itu, Indonesia gencar mengusulkan inisiatif kemanusiaan yang bersifat netral dan tidak memihak.

Dari sisi diplomasi bilateral, Indonesia juga menjalin komunikasi intensif dengan negara-negara berpengaruh yang memiliki hubungan strategis dengan Myanmar. Hubungan ini digunakan untuk mendorong negara-negara tersebut agar menekan junta secara konstruktif. Misalnya, dengan meminta mereka memfasilitasi akses bantuan kemanusiaan atau mendukung inisiatif dialog yang diusulkan ASEAN.

Kendati demikian, dinamika geopolitik sering kali membatasi ruang gerak diplomasi Indonesia. Negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia memiliki kepentingan strategis di Myanmar yang membuat mereka enggan memberikan tekanan keras terhadap junta. Indonesia harus menavigasi hubungan dengan negara-negara ini secara hati-hati, menjaga kerja sama di bidang lain sambil tetap menyuarakan penyelesaian damai.

Dalam proses ini, dukungan masyarakat internasional terhadap upaya Indonesia diakui secara luas. Sejumlah laporan lembaga *think-tank* dan organisasi internasional menyoroti bahwa Indonesia memainkan peran yang tidak tergantikan dalam menjaga momentum diplomasi ASEAN terkait Myanmar. Bahkan, beberapa pihak menyarankan agar Indonesia terus memimpin inisiatif ini meskipun masa keketuaannya di ASEAN telah berakhir.

Indonesia juga memanfaatkan pendekatan diplomasi publik untuk memperkuat pesan bahwa penyelesaian krisis Myanmar adalah kepentingan bersama kawasan. Melalui pernyataan resmi dan kampanye media, Indonesia berusaha membangun kesadaran publik di kawasan Asia Tenggara mengenai pentingnya stabilitas Myanmar bagi keamanan dan kemakmuran regional.

Selain itu, Indonesia mendukung upaya dialog antaragama dan antarbudaya sebagai salah satu instrumen membangun perdamaian. Inisiatif ini bertujuan meredakan ketegangan sosial yang diperburuk oleh perbedaan etnis dan agama di Myanmar. Dengan melibatkan tokoh agama dan komunitas lokal, Indonesia berharap dapat menciptakan jembatan komunikasi yang melampaui batas politik formal.

Penting untuk dicatat bahwa semua upaya ini dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas dan batasan ASEAN sebagai organisasi regional. ASEAN tidak memiliki instrumen penegakan hukum atau kekuatan militer untuk memaksa pihak-pihak yang berkonflik mematuhi kesepakatan. Oleh karena itu, strategi yang digunakan lebih menekankan pada persuasi, mediasi, dan insentif positif.

Konteks inilah yang membuat diplomasi Indonesia dalam isu Myanmar menjadi kompleks. Indonesia harus menyeimbangkan berbagai faktor: menjaga kesatuan ASEAN, mendorong kemajuan nyata di lapangan, mengakomodasi perbedaan kepentingan antaranggota, dan menghadapi tekanan dari komunitas internasional untuk bertindak lebih tegas. Semua ini membutuhkan pendekatan diplomasi yang cermat, konsisten, dan adaptif terhadap perkembangan situasi.

Seiring berjalannya waktu, efektivitas diplomasi Indonesia dalam menangani krisis Myanmar menghadapi ujian yang semakin berat. Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, kemajuan di lapangan tetap terbatas. Kekerasan masih terjadi di berbagai wilayah, sementara junta militer menunjukkan sedikit indikasi kesediaan untuk memenuhi poin-poin dalam Konsensus Lima Poin. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran bahwa krisis Myanmar dapat menjadi konflik berkepanjangan yang sulit diselesaikan melalui mekanisme ASEAN semata.

Dalam menghadapi tantangan ini, Indonesia mulai mengembangkan pendekatan yang lebih terfokus pada hasil jangka menengah dan panjang. Salah satunya adalah mendorong *phased approach* atau pendekatan bertahap dalam implementasi Konsensus Lima Poin. Pendekatan ini membagi proses penyelesaian menjadi serangkaian langkah kecil yang realistis, dimulai dari gencatan senjata terbatas, peningkatan akses bantuan kemanusiaan, hingga pembukaan ruang dialog politik yang lebih inklusif.

Pendekatan bertahap ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kegagalan total akibat tuntutan yang terlalu besar pada tahap awal. Dengan menunjukkan kemajuan meski kecil, diharapkan kepercayaan antar pihak dapat terbangun, dan resistensi terhadap proses perdamaian dapat diminimalkan. Indonesia berperan aktif dalam memfasilitasi pertemuan yang membahas langkah-langkah awal ini, baik melalui jalur resmi ASEAN maupun pertemuan bilateral.

Di sisi lain, Indonesia juga memperkuat kerja sama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga kemanusiaan internasional, dan mitra pembangunan untuk memperluas dampak bantuan yang diberikan. Dengan melibatkan lebih banyak aktor non-negara, Indonesia berharap proses bantuan tidak sepenuhnya tergantung pada jalur resmi yang sering kali terhambat oleh dinamika politik.

Penting pula untuk mencatat bahwa Indonesia menggunakan pendekatan diplomasi lintas sektor dalam mengelola krisis Myanmar. Kementerian Luar Negeri menjadi aktor utama, tetapi koordinasi juga dilakukan dengan Kementerian Pertahanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan lembaga terkait lainnya. Koordinasi ini memastikan bahwa aspek keamanan, kemanusiaan, dan politik dapat ditangani secara terpadu.

Selain fokus pada isu Myanmar itu sendiri, Indonesia juga mengupayakan agar pembahasan krisis ini tetap relevan dalam agenda yang lebih luas, seperti keamanan maritim, perdagangan regional, dan pembangunan berkelanjutan. Dengan mengaitkan isu Myanmar dengan kepentingan strategis kawasan, Indonesia berusaha mendapatkan dukungan yang lebih konsisten dari negara-negara anggota ASEAN yang mungkin awalnya menganggap masalah ini sebagai urusan internal Myanmar.

Kepemimpinan Indonesia dalam isu Myanmar juga menjadi ajang pembuktian bagi kebijakan luar negeri yang bebas aktif. Dalam konteks ini, “bebas” berarti Indonesia tidak terikat pada blok kekuatan besar tertentu, sementara “aktif” berarti terlibat secara langsung dalam upaya penyelesaian masalah internasional. Peran aktif ini terlihat jelas dari upaya diplomasi yang intens, baik secara bilateral maupun multilateral, serta keterlibatan dalam penyaluran bantuan kemanusiaan. Namun, tantangan yang dihadapi tidak hanya berasal dari faktor eksternal. Di dalam negeri, terdapat pandangan yang beragam mengenai seberapa jauh Indonesia harus terlibat dalam krisis Myanmar. Sebagian pihak menilai bahwa keterlibatan yang terlalu dalam berisiko mengalihkan sumber daya diplomatik dari isu-isu lain yang juga penting bagi kepentingan nasional. Sebaliknya, pihak lain berpendapat bahwa sebagai pemimpin kawasan, Indonesia memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk mengambil peran utama.

Dalam menjawab dilema ini, pemerintah Indonesia menekankan bahwa keterlibatan dalam krisis Myanmar justru memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci di Asia Tenggara. Dengan membantu menjaga stabilitas kawasan, Indonesia secara tidak langsung melindungi kepentingan nasionalnya sendiri, termasuk keamanan perbatasan, arus perdagangan, dan investasi. Sejumlah evaluasi terhadap langkah-langkah Indonesia menunjukkan bahwa meskipun hasil konkret di Myanmar masih terbatas, diplomasi yang dilakukan berhasil menjaga pintu dialog tetap terbuka. Dalam konflik yang kompleks dan penuh ketidakpercayaan seperti di Myanmar, mempertahankan komunikasi dan meminimalkan eskalasi kekerasan adalah pencapaian yang signifikan.

Di akhir masa keketuaannya di ASEAN, Indonesia mendorong agar negara yang mengambil alih kepemimpinan melanjutkan inisiatif-inisiatif yang telah dibangun. Hal ini termasuk mekanisme pemantauan implementasi Konsensus Lima Poin, dukungan terhadap utusan khusus yang memiliki akses luas, serta kerja sama erat dengan PBB dan mitra internasional lainnya. Indonesia juga menekankan pentingnya mempertahankan isu Myanmar sebagai prioritas hingga tercapai penyelesaian yang berkelanjutan. Pendekatan yang memadukan ketegasan prinsip dengan fleksibilitas taktis, serta menggabungkan jalur diplomasi resmi dan non-resmi, diharapkan dapat menjadi model untuk upaya penyelesaian krisis Myanmar ke depannya.

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis peran diplomasi Indonesia dalam menangani krisis Myanmar pasca kudeta militer 2021, dengan fokus pada implementasi Konsensus Lima Poin ASEAN. Berdasarkan kajian pustaka, data dokumenter, dan analisis kebijakan luar negeri, ditemukan bahwa Indonesia mengoptimalkan posisinya baik di tingkat bilateral maupun multilateral untuk menjaga relevansi ASEAN, mendorong keterlibatan semua pihak, dan memastikan penyaluran bantuan kemanusiaan. Strategi yang digunakan memadukan diplomasi resmi, diplomasi kemanusiaan, dan quiet diplomacy untuk membangun confidence-building measures di tengah keterbatasan mandat ASEAN.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun implementasi konsensus berjalan lambat akibat resistensi junta, perbedaan pendekatan di antara anggota ASEAN, dan

kompleksitas geopolitik, diplomasi Indonesia tetap berhasil mempertahankan isu Myanmar sebagai prioritas regional serta menjaga jalur komunikasi terbuka dengan semua pihak. Kepemimpinan Indonesia selama masa keketuaannya di ASEAN 2023 juga memperlihatkan upaya memperkuat mekanisme pemantauan, memperluas akses bantuan kemanusiaan, dan melibatkan aktor eksternal secara konstruktif.

Temuan ini menegaskan bahwa dalam konteks ASEAN, penyelesaian konflik internal memerlukan kombinasi ketegasan prinsip dan fleksibilitas taktis. Pengalaman Indonesia pada kasus Myanmar memberikan pelajaran berharga mengenai bagaimana organisasi regional dapat merespons krisis serupa di masa depan, sekaligus memperkuat posisi Indonesia sebagai aktor kunci dalam menjaga stabilitas dan keamanan kawasan Asia Tenggara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mujiono, D., Alexandra, F., & Sagena, U. (2019). *Multi Track Diplomacy: Teori dan Studi Kasus*.

Artikel Jurnal

Ali Fikri, A., & Mayola, J. (2024). RESPON INDONESIA TERHADAP KRISIS PENGUNGSI ROHINGYA PERIODE 2022-2023. *Emerald: Journal of Economics and Social Sciences*, 3(2), 51–64.

Gunawan, T. (2024). Between Principles and Actions: ASEAN and Indonesia in Dealing With The Political Crisis In Myanmar. *Jurnal Global & Strategis*, 18(1), 81–106.
<https://doi.org/10.20473/jgs.18.1.2024.81-106>

Rozak, A. (2024). Kudeta Militer di Myanmar dan Prinsip Non-Intervensi ASEAN. *ULIL ALBAB : Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(2), 113–119.

Artikel Berita

Dianti, T., & Firdaus, A. (2023, May 5). Indonesian foreign minister: Jakarta has quietly engaged with Myanmar stakeholders, including NUG. *Benar News*.
<https://www.benarnews.org/english/news/indonesian/jakarta-talked-with-nug-others-myanmar-retno-05052023131416.html>

Perawongmetha, A. (2024, April 18). Menilik Jejak Sejarah Kudeta Junta Militer Di Myanmar. *Tempo*. <https://www.tempo.co/internasional/menilik-jejak-sejarah-kudeta-junta-militer-di-myanmar-67214>

Sitoresmi, A. R. (2024, September 2). ASEAN Didirikan pada Tahun Berapa? Lengkap dengan Sejarah dan Negara Anggotanya. *Liputan6*.
<https://www.liputan6.com/hot/read/5721042/asean-didirikan-pada-tahun-berapa-lengkap-dengan-sejarah-dan-negara-anggotanya>

Wardah, F. (2023, June 20). Kemlu RI: Konsensus Lima Poin Harus Jadi Pedoman Utama ASEAN untuk Bantu Myanmar. *Voa Indonesia*. <https://www.voaindonesia.com/a/kemlu->

ri-konsensus-lima-poin-harus-jadi-pedoman-utama-asean-untuk-bantu-
myanmar/7144502.html

Wirengjurit, D. (2023, August 28). Masih Adakah "ASEAN Way"? *Kompas*.
<https://www.kompas.id/artikel/masih-adakah-asean-way>